

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ghazali, Kurniawan. 2013. *Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Kata Pena, Cetakan Ke-1.
- Harsono, Boedi. 1971. *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannja*, Djakarta: Djambatan
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum dan politik Agraria*, Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika.
- Mustofa, Bachsan. 1988. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Bandung: Remadja Karya.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Shodiki, Achmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Reforma Agraria*, Jakarta.
- Soebekti dan R. Tjitrosoedibio. 1983. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Soeprapto, R. 1986. *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktik*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal Penelitian:

- Ariyanto, Muhammad Fahmi. "Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absenteeberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Di Kabupaten Kotawaringin Timur". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. "Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-

Pokok Agraria”. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotarian. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2003.

Fiani, Wiwik Eka. “Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Pancasakti Tegal. 2020.

Harry, Musleh. “Problematisa Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang. Malang”, *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Volume 12, No.1, 2020: Hlm: 227-240.

Ika, Syahrir, Hadi Setiawan dan Sofia Arie Damayanty. “Evaluasi Politik Indonesia dan Dukungan Politik Fiskal”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 19, No.1, 2015: Hlm 1-26.

Malarvisi, Delta. “Jaminan Hak Dan Kewajiban Pedagang Di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.

Nugraha, I Wayan Putra dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi.”Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan di Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, No.1, 2020: Hlm: 319-339.

Pravitasari, Ajeng Savira. “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pelaksanaan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria tentang Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Absentee di Kabupaten Kendal”. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 5 Halaman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Jarak Kepemilikan Tanah Pertanian di Luar Kecamatan yang Berbatasan di Kabupaten Bantul.
- Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 268 Tahun 2002 Tentang Penentuan Jarak Pemilikan Tanah *Absentee* Bagi Tanah Pertanian.

**Internet:**

<https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada tanggal  
10 Desember 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan> diakses pada tanggal 14 Desember  
2022

[https://jdih.bolmutkab.go.id/uploads/majalahhukum/beda\\_peraturan\\_keputusan  
.pdf](https://jdih.bolmutkab.go.id/uploads/majalahhukum/beda_peraturan_keputusan.pdf) diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah> diakses pada tanggal 19 Oktober  
2022